BAB VI
EVALUASI SUBSTANSI RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2018

VI.1. Evaluasi Visi dan Misi dalam RPJMD

Dalam kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2013-2018 menyusun visi dan misi yang merupakan gambaran otentik Provinsi Jawa Tengah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Visi Provinsi Jawa Tengah merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2013 - 2018. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Jawa Tengah yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2018 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 adalah :

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI
"Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"

Review penjabaran Visi dan Misi pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1
Review Penjabaran Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

NO	VISI		MISI	INDIKATOR	PENJELASAN
	PENGERTIAN	INDIKATOR			
1	**SEJAHTERA**				
	1. Kondisi masyarakat terpenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman, lingkungan hidup dan sumber daya alam, partisipasi dlm kehidupan sosial & politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan);	1. Sandang: - 2. Pangan: Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) 3. Perumahan - Rasio RTLH - Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani 4. Air bersih - Persentase cakupan layanan air minum perkotaan - Persentase cakupan layanan air minum perdesaan - Persentase cakupan layanan sanitasi 5. Kesehatan - AKI/100.000 Kelahiran Hidup (KH) - AKB/1.000 KH - AKABA/1.000 KH - Angka Kematian DBD (%)	1. Misi 1: Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan berkepribadian di Bidang Kerakyatan	1. Persentase capaian sasaran pembangunan	Indikator dalam masing-masing telah mencerminkan perwujudan visi pembangunan Jawa Tengah, namun demikian belum menunjukan indikator sejahtera dan berdikari secara spesifik. Rekomendasi: Perlu dirumuskan secara spesifik indikator sejahtera dan berdikari.
			2. Misi 2: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran	1. Persentase angka kemiskinan	
				2. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	
				3. Keterserapan Lulusan SMK pada DUDI dan Kewirausahaan	
				4. Keterserapan Lulusan LKP pada DUDI dan Kewirausahaan	
				5. Jumlah regulasi kedaulatan pangan	
				6. Ketersediaan pangan utama	
				7. Persentase penguatan cadangan pangan	

NO	VISI		MISI	INDIKATOR	PENJELASAN
	PENGERTIAN	INDIKATOR			
		- Angka Kesakitan DBD/100.000 penduduk - Angka penemuan kasus HIV/ AIDS, TB Paru - Angka Kesakitan Malaria - Angka Prevalensi Gizi Buruk - Persentase DO KB - Persentase *Unmet Need* - Persentase CPR 6. Pendidikan - Angka rata-rata lama sekolah (tahun) - APK PAUD/TK - APK SMP/SMPLB/MTs/ Paket B - APK SMA/SMALB/MA/ Paket C - APM SD/SDLB/MI/ Paket A - APM SMP/SMPLB/MTs/ Paket B		8. Persentase ketersediaan stok, harga dan akses pangan di daerah 9. Skor Pola Pangan Harapan 10. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 11. Persentase penanganan daerah rawan pangan 12. Jumlah produksi padi (Juta Ton) 13. Jumlah produksi tebu (Juta Ton) 14. Jumlah produksi daging (Juta Kg) 15. Produksi Perikanan Tangkap (ribu ton) 16. Produksi Perikanan Budidaya (ribu ton) 17. Persentase Penyuluh yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang Keahlian 18. Tingkat konsumsi ikan	

NO	VISI		MISI	INDIKATOR	PENJELASAN
	PENGERTIAN	INDIKATOR			
		- Angka kelulusan SD/SDLB/MI - Angka kelulusan SMP/SMPLB/MTs - Angka kelulusan SMA/SMALB/MA - Angka melek huruf (penduduk usia > 15 tahun). 7. Pekerjaan: TPT 8. Rasa aman - Jumlah PMKS yang mendapat penanganan - Persentase penanganan konflik sosial - Rasio Kab/Kota Layak Anak 9. Lingkungan hidup dan sumber daya alam - Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis - Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW - Luas RTH - Penanaman		19. Rasio Elektrifikasi 20. Persentase pemanfaatan EBT terhadap total konsumsi energi 21. Jumlah regulasi keuangan desa dan pengelolaan aset/kekayaan desa. 22. Jumlah produk/ komoditas OVOP 23. Persentase koperasi sehat 24. Persentase koperasi aktif 25. Jumlah UP2K yang aktif (kelompok) 26. Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit) 27. Jumlah pasar desa yang direvitalisasi (unit) 28. Jumlah UED-SP yang aktif (unit) 29. Pertumbuhan Industri Pengolahan (%) 30. Kontribusi Sektor - terhadap PDRB (%)	

NO	VISI		MISI	INDIKATOR	PENJELASAN
	PENGERTIAN	INDIKATOR			
		mangrove - Menurunnya luasan genangan akibat banjir (Ha)		31. Jumlah investor (PMA/ PMDN)	
				32. Nilai investasi (Trilyun)	
				33. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
				34. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
				35. Rasio kabupaten/kota menuju Kota Layak Anak	
				36. APM SD/SDLB/MI/ Paket A	
				37. APK SMP/SMPLB/ MTs/Paket B	
				38. APM SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	
				39. APK SMA/SMALB/ MA/Paket C	
				40. Jumlah desa vokasi yang dikembangkan	
				41. Jumlah pelaku/kelompok masyarakat yang terfasilitasi pendidikan kemasyarakatan	

NO	VISI		MISI	INDIKATOR	PENJELASAN
	PENGERTIAN	INDIKATOR			
				42. Jumlah kewirausahaan pemuda	
				43. Persentase penanganan PMKS	
				44. Persentase penguatan kapasitas PSKS	
				45. Peningkatan sarpras balai resos	
			3. Misi 4: Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan	1. Persentase penindakan pelanggaran perda	
				2. Persentase penanganan konflik sosial	
				3. Meningkatnya peran masyarakat/sikap toleransi dan gotong royong	
				4. Kesiapsediaan komponen pendukung dan cadangan (persentase)	
				5. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	
				6. Persentase pemilih dalam menggunakan hak pilihdalam Pemilu	

NO	VISI		MISI	INDIKATOR	PENJELASAN
	PENGERTIAN	INDIKATOR			
				7. Persentase keterwakilan politik perempuan di Lembaga Parlemen	
				8. Persentase penerapan indikator SPM kesenian (Gelar Seni, Sarana Kesenian, Penyeleng-garaan Misi Kesenian)	
				9. Persentase dan jumlah lokasi pelestarian cagar budaya	
				10. Penerapan kurikulum muatan lokal bahasa jawa jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah	
			4. Misi 6: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI)/100.000 KH	
				2. Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 KH	
				3. Angka Kematian Balita (AKABA)/1000 KH	
				4. Angka Kematian DBD (%)	
				5. Angka Kesakitan DBD (Per 100.000 pddk)	
				6. Persentase Drop Out Keluarga Berencana	
				7. Persentase *Unmet Need*	

NO	VISI		MISI	INDIKATOR	PENJELASAN
	PENGERTIAN	INDIKATOR			
	2. Terciptanya hubungan antar rakyat Jawa Tengah yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian dan *tepo seliro*;	1. Meningkatnya peran masyarakat/sikap toleransi dan gotong royong		8. Persentase Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	
				9. Angka rata-rata lama sekolah	
				10. APK PAUD/TK	
				11. APK SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	
	3. Tersedia prasarana dan sarana publik terkait dengan supra dan infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi	1. Persentase kondisi jaringan irigasi baik 2. Persentase pemenuhan kebutuhan air baku 3. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik 4. Persentase panjang jalan dengan lebar ≥ 6,00 meter 5. Persentase panjang jalan provinsi dengan MST ≥ 8,00 Ton 6. Jumlah kab/kota yang mengembangkan Angkutan umum dan massal 7. Jumlah desa yang mengembangkan angkutan pedesaan		12. APK SMA/SMALB/MA/ Paket C	
				13. APM SD/SDLB/MI/ Paket A	
				14. APM SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	
				15. Angka Kelulusan SD/SDLB/MI	
				16. Angka Kelulusan SMP/SMPLB/MTs	
				17. Angka Kelulusan SMA/SMALB/MA/SMK	
				18. Persentase Ruang Kelas SD/SDLB/MI sesuai SNP	
				19. Persentase Ruang Kelas SMP/SMPLB/MTs sesuai SNP	

NO	VISI		MISI	INDIKATOR	PENJELASAN
	PENGERTIAN	INDIKATOR			
				20. Persentase Ruang Kelas SMA/SMALB/MAdan SMK sesuai SNP	
				21. Persentase SD/SDLB/MI yang terakreditasi	
				22. Persentase SMP/SMPLB/MTsyang terakreditasi	
				23. Persentase SMA/SMALB/MAdan SMK yang terakreditasi	
				24. Persentase Pendidik berkualifikasi S1 dan D4	
				25. Jumlah pengunjung perpustakaan provinsi per tahun	
				26. Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan provinsi	
				27. Jumlah perpustakaan desa yang memenuhi standar perpustakaan	
				28. Persentase cakupan layanan air minum perkotaan	
				29. Persentase cakupan layanan air minum perdesaan	

NO	VISI		MISI	INDIKATOR	PENJELASAN
	PENGERTIAN	INDIKATOR			
				30. Persentase cakupan layanan sanitasi	
				31. Rasio rumah layak huni	
				32. Persentase kondisi jaringan irigasi baik	
				33. Persentase pemenuhan kebutuhan air baku	
2	**BERDIKARI**				
	1. Tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Inflasi 3. Nilai ekspor non migas 4. Nilai impor non migas 5. Ketersediaan pangan utama (ton beras) 6. Persentase penguatan cadangan pangan 7. Skor Pola Pangan Harapan 8. Produksi padi (juta ton) 9. Produksi tebu (juta ton) 10. Produksi daging (juta kg) 11. Produksi perikanan tangkap (ton) 12. Produksi perikanan budidaya (ton)	1. Misi 1: Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan berkepribadian di Bidang Kerakyatan	1. Persentase capaian sasaran pembangunan	
			2. Misi 3: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan "Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"	1. Indonesia *Governance Index* (IGI)	
				2. Promosi Jabatan Struktural secara terbuka	
				3. Uji kompetensi dan/ atau sertifikasi Pegawai ASN bagi PNS pada Jabatan: administrasi, fungsional, dan pimpinan tinggi.	

NO	VISI		MISI	INDIKATOR	PENJELASAN
	PENGERTIAN	INDIKATOR			
		13. Jumlah komoditas OVOP 14. Persentase koperasi sehat 15. Persentase koperasi aktif 16. Jumlah UP2K yang aktif (unit) 17. Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit) 18. Jumlah UED-SP yang aktif (unit)		4. Jumlah PNS yang menempuh ijin belajar dan menerima bantuan biaya pendidikan 5. Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang dilakukan pengukuran IKM 6. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan melalui PTSP	
	2. Terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaan dan daerah perkotaan yang bersinergi	1. Indeks Gini 2. Indeks Williamson 3. Rasio elektifikasi 4. Persentase pemanfaatan EBT		7. Rasio penduduk memiliki e-KTP per wajib e-KTP (%) 8. Persentase penduduk 0-18 tahun memiliki akte kelahiran 9. Jumlah kabupaten/kota mengoperasikan SIAK 10. Implementasi Aksi PPK 11. Opini BPK (WTP) 12. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	
				13. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang disusun	

NO	VISI		MISI	INDIKATOR	PENJELASAN
	PENGERTIAN	INDIKATOR			
			3. Misi 5: Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak	1. Persentase pelaksanaan *rembug* masyarakat dalam pengambilan keputusan	
				2. Rasio forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan	
				3. Indeks Gini	
				4. Indeks Williamson	
	3. Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan	1. Opini BPK (WTP) 2. Persentase aset yg dikelola dgn baik	4. Misi 7: Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan	1. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	
				2. Persentase panjang jalan dengan lebar ≥ 6,00 m	
				3. Persentase panjang jalan Provinsi sebagai jalan kolektor (MST ≥ 8 Ton)	
	4. Meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung kondusivitas politik daerah.	1. Jumlah investor (PMA/PMDN) 2. Nilai onvestasi (PMA/PMDN) 3. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)		4. Jumlah kab/kota yang melakukan pengembangan angkutan umum dan massal di Jawa Tengah	
				5. Jumlah desa yang melakukan pengembangan angkutan pedesaan	

NO	VISI		MISI	INDIKATOR	PENJELASAN
	PENGERTIAN	INDIKATOR			
				6. Persentase ketersediaan prasarana keselamatan jalan provinsi	
				7. Lokasi ketersediaan prasarana keselamatan perlintasan KA di jalan provinsi	
				8. Jumlah terminal type B dioperasikan	
				9. Menurunnya luasan daerah genangan akibat banjir	
				10. Terfasilitasinya pembangunan infrastruktur strategis	
				11. Jumlah SKPD yang mengembangkan teknologi informasi	
				12. Persentase Informasi status mutu air (SPM)	
				13. Persentase Informasi status mutu udara ambien (SPM)	
				14. Persentase pengaduan akibat dugaan pecemaran/ kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM)	
				15. Jumlah luas Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan	

NO	VISI		MISI	INDIKATOR	PENJELASAN
	PENGERTIAN	INDIKATOR			
				16. Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis	
				17. Luas hutan yang dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman bawah tegakan (Ha)	
				18. Persentase kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	
				19. Persentase unit usaha masyarakat sekitar hutan yang berkembang	
				20. Jumlah BPBD kab/kota berdasar Perda	
				21. Jumlah Desa Tangguh Bencana	

Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi Jawa Tengah yaitu Sejahtera dan Berdikari, maka perlu adanya suatu tolok ukur berupa indikator-indikator yang dapat mewakili atau menggambarkan kondisi di Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari. Adapun aspek-aspek yang ingin ditempuh dalam rangka pencapaian kondisi Sejahtera dan Berdikari yaitu sebagai berikut:

1. Visi Sejahtera (aspek pelayanan dasar dan indeks kebahagiaan)

   Pada aspek pelayanan dasar meliputi: Pendidikan; Kesehatan; PU & Tata Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; Sosial.

   Pada Indeks Kebahagiaan meliputi aspek: Kesehatan; Pendidikan; Pekerjaan; Pendapatan Rumah Tangga; Keharmonisan Keluarga; Ketersediaan Waktu Luang; Sosial; Kondisi Rumah Dan Aset; Keadaan Lingkungan; Kondisi Keamanan.

   Dari penjabaran aspek-aspek tersebut di atas maka dirumuskan indikator-indikator sebagai tolok ukur visi sejahtera yaitu sebagai berikut:

   A. Aspek pangan dengan indikator:
      1) Ketersediaan pangan utama;
      2) Persentase ketersediaan stok, harga dan akses pangan di daerah;
      3) Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan;
      4) Persentase penanganan daerah rawan pangan;
      5) Jumlah produksi padi (Juta Ton);
      6) Jumlah produksi tebu (Juta Ton);
      7) Jumlah produksi daging (Juta Kg);
      8) Persentase Penyuluh yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang Keahlian;
      9) Tingkat konsumsi ikan.

   B. Aspek kesehatan dengan indikator:
      1) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH;
      2) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH;
      3) Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 KH;
      4) Angka Kematian DBD (%);
      5) Angka Kesakitan DBD (per 100.000 penduduk);
      6) Persentase DO KB;
      7) Persentase Unmet Need;
      8) Persentase Contraceptive Prevalence Rate (CPR);
      9) Penyediaan Jamkesda.

   C. Aspek pendidikan dengan indikator:
      1) Angka rata-rata lama sekolah;
      2) APK SMA/SMALB/MA/Paket C;
      3) Angka kelulusan SMA/SMALB/MA/SMK;
      4) Persentase ruang kelas SMA/SMALB/MA/SMK sesuai SNP;
      5) Persentase SMA/SMALB/MA/SMK yang terakreditasi;
      6) Persentase Pendidik berkualifikasi S1/D4;
      7) Penyediaan Bea Siswa Miskin (BSM);
      8) Jumlah desa vokasi yang dikembangkan;
      9) Jumlah pelaku/kelompok masyarakat yang terfasilitasi pendidikan kemasyarakatan.

D. Aspek pencipataan dan perluasan lapangan kerja dengan indikator:
   1) Tingkat partisipasi angkatan kerja;
   2) Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja;
   3) Jumlah AKAN (orang);
   4) Produktivitas tenaga kerja;
   5) Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja;
   6) Jumlah kewirausahaan pemuda.
E. Aspek air bersih dengan indikator:
   1) Persentase cakupan layanan air minum perkotaan;
   2) Persentase cakupan layanan air minum perdesaan.
F. Aspek rumah layak huni dengan indikator:
   1) Persentase cakupan layanan sanitasi;
   2) Rasio rumah layak huni.
G. Aspek perlindungan masyarakat dan kesjahteraan sosial dengan indikator:
   1) Persentase penanganan konflik sosial;
   2) Kondusivitas daerah provinsi dan kabupaten/kota;
   3) Persentase penanganan PMKS;
   4) Persentase penguatan kapasitas PSKS.
H. Aspek hubungan sosial masyarakat dengan indikator:
   1) Meningkatnya peran masyarakat/sikap toleransi dan gotong royong;
   2) Persentase pelaksanaan rembug masyarakat dalam pengambilan keputusan.
I. Aspek akses terhadap informasi dengan indikator:
   1) Jumlah SKPD yang mengembangkan teknologi informasi;
   2) Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan LPSE dalam pengadaan barang dan jasa.
J. Aspek sarana dan prasarana publik dengan indikator:
   1) Peningkatan luas kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan.

2. Visi Berdikari (aspek kedaulatan pangan dan energi)

   Pada aspek kedaulatan pangan akan difokuskan pada swasembada pangan (padi, jagung, kedelai) khususnya pada komoditas kedelai sedangkan aspek kedaulatan energi akan difokuskan pada energi terbarukan, maka dirumuskan indikator-indikator sebagai tolok ukur visi berdikari yaitu sebagai berikut:

   A. Berlandaskan dengan membangun berdasarkan kekuatan yang ada melalui eksplorasi seluruh potensi IPTEK, kearifan lokal, SDA-LH, SDM, kerjasama
      1) Produksi padi (ton);
      2) Produksi jagung (ton);
      3) Produksi Keledai (ton);
      4) Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara;
      5) Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara;
      6) Nilai eksport non migas;
      7) Jumlah UED-SP yang aktif;

8) Jumlah produk komoditas OVOP.

B. Berlandaskan dengan meningkatkan keberdayaan masyarakat (peningkatan keterampilan, pengetahuan, peluang dan pengembangan diri masyarakat)
   1) Jumlah SDM KUMKM yg terlatih;
   2) Jumlah penyelenggaraan bimbingan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat;
   3) Jumlah sarjana penggerak pembangunan perdesaan;
   4) Jumlah kewirausahaan pemuda;
   5) Pengembangan kelembagaan usaha industri.

C. Berlandaskan dengan tercapainya daya saing kompetitif (keunggulan SDA, SDM, Sarpras Pembangunan, pemerintahan dan pelayanan merata)
   1) Rasio Elektrifikasi (%);
   2) Persentase panjang jalan dalam kondisi baik;
   3) Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik;
   4) Persentase pemenuhan kebutuhan air baku;
   5) Terfasilitasinya pembangunan infrastruktur strategis;
   6) Jumlah UPP yang dilakukan pengukuran IKM;
   7) Prosentase pelayanan perijinan dan non perijinan;
   8) Tersedianya informasi peluang usaha;
   9) Ketersediaan harga jenis komoditas bahan pokok;
   10) Persentase pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap total konsumsi energi.

VI.2. Evaluasi Indikator Kinerja Terhadap Kebijakan Pemerintah Pusat

Beberapa indikator kinerja pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 berlandaskan dari kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Adanya dinamika kebijakan dari pemerintah pusat akan berdampak pada indikator-indikator kinerja pembangunan di daerah. Selanjutnya dari hasil evaluasi terdapat beberapa indikator yang perlu dihilangkan/dihapus, antara lain indikator yang perlu dihilangkan/dihapus dapat dilihat pada tabel 6.2.

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Yang Akan Dihilangkan/Hapus

INDIKATOR	PENJELASAN
IGI	❑ IGI bukan merupakan indikator yang digunakan dalam RPJMN 2015-2019, melainkan indikator yang diukur oleh organisasi Non Pemerintah yang peduli terhadap tata kelola pemerintahan, dan tidak diukur setiap tahun. ❑ IGI dihilangkan dari indikator RPJMD 2013-2018, sebagaimana hasil konsultasi tertulis dengan Bappenas. (Surat Direktur Aparatur Negara Bappenas No. 4681/Dt.2.4/07/2015 tanggal 28 Juli 2015)
RSBI	❑ Kebijakan Nasional Sudah Tidak Di Berlakukan Lagi, dikembalikan kepada kurikulum 2013.

VI.3. Evaluasi Target Indikator Kinerja Pembangunan

Pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung target indikator pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 perlu dilakukan evaluasi agar pencapaian pembangunan dapat terwujud sesuai dengan harapan yang telah direncanakan. Pelaksanaan program/kegiatan dapat tercapai apabila capaiannya sudah memenuhi target. Pada pelaksanaannya beberapa indikator mengalami dinamika kebijakan yang berkembang baik dari pemerintah pusat maupun kabupaten/kota serta dinamika kondisi dilapangan. Perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat diantaranya seperti penghitungan dalam penentuan target, penetapan target daerah dalam RPJMN Tahun 2015-2019, dan sebagainya. Sedangkan untuk dinamika yang berkembang di kabupaten/kota dalam mempengaruhi target indikator kinerja diantaranya seperti perubahan kewenangan ruas jalan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi dan sebagainya. Kemudian untuk dinamika kondisi dilapangan yang mempengaruhi target diantaranya capaian indikator kinerja yang telah tercapai pada triwulan 3 (tiga) tahun 2015 sesuai kondisi target akhir tahun 2018 karena adanya kebijakan kepala daerah maupun program/kegiatan yang mempercepat capaian target indikator. Beberapa indikator kinerja yang mengalami perubahan target dapat dilihat pada tabel 6.3.

Tabel 6.3
Indikator Kinerja Yang Mengalami Perubahan Target

NO	INDIKATOR	CAPAIAN s.d. Tw III	TARGET AKHIR RPJMD	PENYESUAIAN/ PERUBAHAN (Akhir 2018)	PENJELASAN
1	Jumlah Penduduk miskin	13,58%	7,8%-7,6%	9,93%-10,4%	a. Tren Penurunan b. Target RPJMN c. Kondisi Perekonomian Nasional dan Global
2	Pertumbuhan Ekonomi	5%	6,2%-6,7%	5,8%-6,2%	Penyesuaian dengan Kondisi Perekonomian Global dan Nasional.
3	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Baku	53,60	60%	62,50%	Adanya pencanangan pembangunan 1000 embung. **(Kenaikan angka target ini positif karena meningkatkan kinerja pembangunan)**
4	AKI	437 Kasus	116 per 100.000 KH	2017 (126); 2018 (125)	Mengacu pada target AKI tingkat Nasional yaitu 306 per 100.000 KH di tahun 2019 maka diperkirakan target pada RPJMD tidak akan tercapai. **(Kenaikan angka target ini negatif karena menurunkan kinerja pembangunan)**
5	AKABA	4.258 Kasus	11 per 1.000 KH	2017 (12,8); 2018 (12,6)	Angka Kematian Balita cenderung tinggi karena dipengaruhi capaian angka kematian ibu yang sulit tercapai. **(Kenaikan angka target ini negatif karena menurunkan kinerja pembangunan)**

NO	INDIKATOR	CAPAIAN s.d. Tw III	TARGET AKHIR RPJMD	PENYESUAIAN/ PERUBAHAN (Akhir 2018)	PENJELASAN
6	Angka Kesakitan DBD	41,27	<20	2017 (>48); 2018 (>47)	Adanya perbedaan penghitungan dengan pemerintah pusat sehingga perlu penyesuaian target angka kesakitan DBD yang mengacu pada Dokumen RPJMN. **(Kenaikan angka target ini negatif karena menurunkan kinerja pembangunan)**
7	Angka Kematian DBD	1,82%	<1	2017 (<2) 2018 (<2)	1. Mendasarkan RPJMN 2015-2019 untuk kematian DBD tidak dijadikan indikator makro bid kesehatan shg direkomendasikan untuk dipindahkan pada indikator Bab VIII; 2. Pencapaian target untuk penanganan DBD masih sulit untuk tercapai dikarenakan virulensi virus semakin kuat dan belum ada obat untuk virus dengue. **(Kenaikan angka target ini positif karena meningkatkan kinerja pembangunan)**
8	Rasio Elektrifikasi (%)	89,29	92,12	94	Adanya pengembangan/pembangunan pembangkit listrik baru yang telah operasional serta kegiatan pembangunan jaringan listrik pedesaan di daerah terpencil, dana bantuan listrik murah untuk masyarakat yang tidak mampu. **(Kenaikan angka target ini positif karena meningkatkan kinerja pembangunan)**
9	SKOR PPH	99,15	92,23	87	Penggunaan metode survey yang menggunakan konsumsi pangan rill menjadi data konsumsi susenas hasil justifikasi dengan pendekatan pengeluaran (2016). **Metode perhitungan menggunakan tahun dasar yang berbeda**. **(Penurunan angka target ini positif karena meningkatkan kinerja pembangunan)**
10	Opini BPK (WTP)	Provinsi dan 10 Kab/Kota	Provinsi dan 35 Kab/Kota	60 % WTP untuk Kabupaten dan 65 % untuk Kota	Mengacu pada sasaran pokok pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019 **(Penurunan angka target ini positif karena meningkatkan kinerja pembangunan)**

VI.4. Evaluasi Atribut Pembentuk Indikator Kinerja Pembangunan

Atribut pembentuk indikator makro yaitu variabel berupa indikator-indikator kinerja yang dapat mempengaruhi dan menentukan nilai dari indikator makro tersebut. Berjalannya waktu beberapa indikator mengalami perubahan atributnya dikarenakan bermacam-macam faktor, antara lain sebagai berikut :

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

1) Perubahan pada indikator

   Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik:

   - Dengan memasukan Harapan Lama Sekolah sehingga didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.
   - PNB (produk Nasional Bruto) perkapita menggantikan PDB (Produk Domestik Bruto) perkapita karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat suatu wilayah.

2) Perubahan pada metode penghitungan

   Metode Perhitungan Agregasi diubah dari rata-rata Arimatik diubah menjadi Rata-rata Geometrik, yang diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik ketiga dimensi (Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi) harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

B. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

1) Dasar Pertimbangan

   Perubahan tahun dasar PDRB dilakukan seiring dengan adopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam *2008-System of National Accounts* (SNA-2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables (SUT).*

2) Perubahan Sektor Ekonomi

   - Semula :

     9 Sektor Ekonomi yaitu: Pertanian; Pertambangan dan Galian; Industri Pengolahan; Listrik, Gas dan Air Bersih; Bangunan; Perdagangan, Hotel dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perush; dan Jasa-jasa.

   - Menjadi :

     17 Sektor Ekonomi yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Gas; Kontruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi serta Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya.

3) Manfaat
   - Menginformasikan perekonomian nasional dan regional terkini, seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
   - Meningkatkan kualitas data PDRB;
   - Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.